# TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

# Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Pada UPTD. Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**

**Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik**


**Disusun Oleh :**

**ADIARYANTO**

**NIM. 530078409**


**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2025**

# ABSTRAK

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA UPTD. PELABUHAN PENYEBERANGAN JUATA KOTA TARAKAN

Adi Aryanto
adhiearyanto@gmail.com
Sekolah Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan retribusi jasa pelayanan kepelabuhanan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan yang diatur Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan retribusi berdasarkan regulasi tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri atas pejabat OPD teknis, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPTD, staf lapangan, dan masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan retribusi jasa pelayanan kepelabuhanan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata belum berjalan dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini mencakup pada aspek komunikasi, regulasi retribusi telah tersampaikan dengan baik di tingkat internal organisasi, meskipun sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas. Pada aspek sumber daya, terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Pada aspek disposisi, kurangnya monitoring dari pimpinan meskipun pelaksana kebijakan menunjukkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan. Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan SOP yang belum maksimal. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan digitalisasi sistem pemungutan retribusi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, serta optimalisasi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pembayaran retribusi dan efektivitas kebijakan. Dengan langkah tersebut, implementasi kebijakan diharapkan semakin optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kebijakan, Kepelabuhanan, Pelayanan, Retribusi

# ABSTRACT

## IMPLEMENTATION OF PORT SERVICE FEE POLICY AT THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (UPTD) OF JUATA FERRY PORT TARAKAN CITY

Adi Aryanto
adhiearyanto@gmail.com
Graduate School
Universitas Terbuka

*This study discusses the implementation of the port service fee policy at the Juata Ferry Port Technical Implementation Unit (UPTD) in Tarakan City, as Tarakan City Regional Regulation Number 3 of 2023. The purpose of this research is to analyze the implementation of the fee policy based on these regulations using the public policy implementation theories of Edward III. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and document studies. Informants were selected through purposive sampling and consisted of technical government agency officials, the Head of the Transportation Office, the Head of UPTD, field staff, and port service users. The results of the study indicate that the implementation of the port service fee policy at the Juata Ferry Port Technical Implementation Unit (UPTD) has not been optimal. Factors affecting the implementation of this policy include communication, as the fee regulations have been well communicated within the organisation, although public awareness remains limited. In terms of resources, there are limitations in human resources, budget, facilities and infrastructure. In terms of disposition, there is a lack of monitoring from leaders, even though policy implementers demonstrate an understanding of their duties and functions and are committed to improving services. In terms of bureaucratic structure, the implementation of SOPs has not been maximised. The study recommends strengthening the digitalization of the fee collection system, enhancing human resource capacity through technical training, and optimizing public outreach regarding the policy to increase compliance and overall policy effectiveness. With these measures, the implementation of the policy is expected to become more effective and contribute to increasing Tarakan City's locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD).*

***Keywords***: *Implementation, Policy, Port Services, Service, Levy*

**UNIVERSITAS TERBUKA**
**SEKOLAH PASCASARJANA**
**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

## LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Tugas Akhir Program Magister yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Pada UPTD. Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 10 Februari 2026

Yang Menyatakan




(ADI ARYANTO)
NIM 530078409

**UNIVERSITAS TERBUKA**
**SEKOLAH PASCASARJANA**
**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

## PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Adi Aryanto |
| NIM | : | 530078409 |
| Program Studi | : | Magister Ilmu Administrasi Publik |
| Judul TAPM | : | Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Pada UPTD. Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan |

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Selasa, 10 Februari 2026 |
| Waktu | : | 09:00 – 10:30 WIB |

dan telah dinyatakan **LULUS**

## PANITIA PENGUJI TAPM

| | Tanda Tangan |
|---|---|
| Ketua Komisi Penguji<br>Nama : Dr. Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si | ..... |
| Penguji Ahli<br>Nama : Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si | ..... |
| Pembimbing I<br>Nama : Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si | ..... |
| Pembimbing II<br>Nama : Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si | ..... |

**PERSETUJUAN TAPM PASCA UJIAN SIDANG**

| | |
|---|---|
| Judul TAPM | : Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Pada UPTD. Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan |
| Penyusun TAPM | : Adi Aryanto |
| NIM | : 530078409 |
| Program Studi | : Magister Ilmu Administrasi Publik |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 10 Februari 2026 |

Menyetujui

Pembimbing II,

Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si
NIP. 197501312005012004

Pembimbing I,

Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si
NIP. 197610142006041002

Penguji Ahli

Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Dr. Siti Aisyah, M.Si.
NIP. 196806121999032001

Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si
NIP. 196305091989031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM penelitian ini dengan judul "Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Pada UPTD. Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan."

Penelitian ini dapat direalisasikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebagai tanda penghargaan yang istimewa, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Seluruh Civitas Akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka yang bayak membantu dalam proses administrasi perkulihaan dan masukannya dalam proses pembelajaran online di UT.
2. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si. dan Ibu Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penyusunan TAPM penelitian ini.
3. Wali Kota Tarakan yang telah memberikan izin belajar kepada peneliti sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran di UT hingga pada tahan penyusunan TAPM ini.
4. Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan beserta jajaran, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan beserta jajaran, dan Kepala UPTD. Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan beserta jajaran yang telah membantu menyediakan data dan

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Keluargaku, Orang Tua, Bapak dan Ibu Mertua, Istriku, Anak-anakku dan saudara-saudaraku terima kasih atas bantuan dan kesabaran yang telah diberikan untukku serta dukungan yang tiada henti yang telah menemani dan memberikan semangat kepadaku dan memotivasi untuk tetap bertahan dan tetap bersemangat untuk meyelesaikan S2 ini.
6. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah membantu memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan TAPM penelitian ini. Ruang yang terbatas ini tidak cukup untuk merangkum nama dan kontribusi-kontribusi Bapak/Ibu, tapi Allah Yang Maha Kuasa tentu tidak menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan Bapak/Ibu sekalian.

Penulis menyadari bahwa TAPM dari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tarakan, 10 Februari 2026
**Penulis,**

**Adi Aryanto**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Adi Aryanto, S.IP. Lahir di Tarakan, Kalimantan Utara tanggal 22 Juni 1987. Dalam menempuh dunia pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres 012 Tarakan tahun 1993 – 1999, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nergeri 3 Tarakan tahun 1999 – 2002, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tarakan tahun 2002 – 2005. Melanjutkan Pendidikan pada Jurusan Manajamen Pembangunan, Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2006 – 2009.

Berikut riwayat singkat pekerjaan :

1. Tahun 2009 s/d 2010 sebagai Staf Pelaksana di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.
2. Tahun 2010 s/d 2011 sebagai Staf Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tarakan (ADC / Ajudan) Wali Kota Tarakan.
3. Tahun 2012 s/d 2013 sebagai Staf Pelaksana di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.
4. Tahun 2013 s/d 2015 sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
5. Tahun 2015 s/d 2022, sebagai Sekretaris Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
6. Tahun 2023 s/d November 2023, sebagai Kepala UPTD. Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan.
7. November 2023 s/d Sekarang sebagai Lurah Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.

Dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat penulis juga terlibat sebagai Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Istiqlal Kecamatan Tarakan Timur.

Tarakan, 10 Februari 2026

**Adi Aryanto**
**NIM. 530078409**

## DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak ..... ii
Lembar Pengesahan Hasil Ujian Sidang ..... v
Lembar Persetujuan TAPM Pasca Ujian Sidang ..... vi
Kata Pengantar ..... vii
Riwayat Hidup ..... ix
Daftar Isi ..... x
Daftar Gambar ..... xii
Daftar Tabel ..... xiii
Daftar Lampiran ..... xiv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Perumusan Masalah ..... 12
C. Tujuan Penelitian ..... 13
D. Kegunaan Penelitian ..... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 15
A. Kajian Teori ..... 15
B. Penelitian Terdahulu ..... 33
C. Kerangka Berpikir ..... 48
D. Definisi Operasional Konsep ..... 51

BAB III METODE PENELITIAN ..... 52
A. Jenis Penelitian ..... 52
B. Sumber Informasi ..... 54
C. Instrumen Penelitian ..... 58
D. Prosedur Pengumpulan Data ..... 58
E. Metode Analisis Data ..... 63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 66
A. Deskripsi Objek Penelitian ..... 66
B. Hasil ..... 77
C. Pembahasan ..... 146

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..... 171
A. Simpulan ..... 171
B. Saran ..... 173

DAFTAR PUSTAKA ..... 178

LAMPIRAN ..... 181

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ..... 50
Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data Penelitian ..... 62
Gambar 4.1 Peta Kota Tarakan ..... 67
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan ..... 71
Gambar 4.3 Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata Pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan ..... 75
Gambar 4.4 SOP Pelayanan Sandar/Tambat Labuh Kapal UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata Pada Dinas Perhubungan ..... 118

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha dan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Tahun 2020 s.d. 2023 ..... 7
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan Tahun 2023 ..... 8
Tabel 1.3 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ..... 10
Tabel 2.1 Keterkaitan Operasionalisasi Konsep dan Tujuan ..... 51
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tarakan ..... 67
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2024 ..... 69
Tabel 4.3 Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Tarakan ..... 74
Tabel 4.4 Keadaan Pegawai UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan ..... 77
Tabel 4.5 Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan ..... 79
Tabel 4.6 Implementasi Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan ..... 134
Tabel 4.7 Perbandingan Target vs Realisasi (2020-2023) ..... 148

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara ..... 181
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian ..... 185
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian ..... 187
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian ..... 195
Lampiran 5 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 ..... 203

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Abdussamad Zuchri, (2021). *Metode Penelitian Kualitatif.* Makassar: CV. Syakir Media Press.

Addinul Muttaqin. (2015). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *JOM FISIP* Vol.2 No.2. Oktober 2015.

Abidin, Said Zainal. (2019). *Kebijakan Publik Edisi 4.* Jakarta : Salmba Humanika.

Aisiyah, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara).* Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Bazarudin Zuhri., et al. (2022). Implementation Of Perda Number 9 Year 2011 Regency Of North Barito Concerning Retribution For Business Services To Regional Ports Managed By Upt Dermaga Muara Teweh. International Journal of Political, Law, and Social Science, Vol.2, No.2,

Budi Herman Sasono. (2012). *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor.* Yogyakarta : Andi.

Dunn Wiliam N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.* Jogjakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press.

Dwijowijota, Nugroho Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.

Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 4 No. 1.

Hamdi Muchlis & Ismaryati Siti. (2021). *Metodologi Penelitian Administrasi.* Tangerang: Universitas Terbuka.

Irawan, Prasetya. (2014). *Metodologi Penelitian Administrasi.* Banten: Universitas Terbuka.

Jones, O, Charles. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lasse. (2014). *Manajemen Kepelabuhanan.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan.* Jakarta : Deputi Bidang Kajian Kebijakan, LAN RI.

Munawir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan.* Edisi Kesebelas. Yogyakarta: Liberti.

Mulyadi Setiawan. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak*. Riau: Perpustakaan Universitas Islam Riau.

Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Nuryanti Mustari. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : LeutikaPrio.

Pramono Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Percetakan Kurnia.

Putra, Windhu. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo.

Rifurariani, W.,Elim, I., dan Kalalo, M.Y.B. (2020). Analisis Retribusi Pelabuhan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Indonesia Accounting Journal*. Vol.2 No. 2. 92-96.

Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Silvani. (2016). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *JOM FISIP* Vol.3 No.2. Oktober 2016.

Subarsono, A.G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suwitri Sri, dkk. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang: Universitas Terbuka.

Wahab. (1998). *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Yanti, D. & Ghozali, R. (2020). Analisis Faktor Capaian Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Angkutan Sungai dan Penyeberangan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Indonesian Treasury Review: *Jurnal Perbendahaaraan, Keuangan Negaran dan Kebijakan Publik*, Vol.5, No.2.

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Produk Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah